

INTISARI

Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam efektivitas penanggulangan kemiskinan melalui analisis pendefinisian serta penetapan sasaran melalui pendataan Jalin Matra PFK yang dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*), dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, FGD, serta studi pustaka. Data kemudian dianalisis melalui reduksi data, peyajian data, serta penarikan kesimpulan. Selanjutnya untuk menguji validitas data menggunakan triangulasi, yang memanfaatkan sesuatu lain di luar data tersebut untuk pembandingan atau pengecekan yang bertujuan memeriksa keabsahan, menjaga obyektifitas data, serta memastikan data valid..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mendefinisikan kemiskinan, birokrat berpendapat bahwa Desil 1 tidak sesuai untuk dimanfaatkan pada Program Jalin Matra PFK. Tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh adat menghendaki agar kemiskinan ditangani bersama-sama antar masyarakat karena merupakan masalah bersama, dan bukanlah suatu takdir perorangan. Sedangkan masyarakat beranggapan bahwa segala pemberian bantuan oleh pemerintah dalam rangka apapun, hendaknya disama ratakan, karena masyarakat melihat bahwa bantuan merupakan pemerataan hasil pembangunan, dan tidak melihat pada peruntukannya. Dalam menghadapi kemiskinan kultural di Kabupaten Probolinggo, program ini pada akhirnya menemui kendala yang berakibat pada ketidakberhasilan sasaran, jumlah dan pemanfaatan. Ketidakberhasilan ini muncul karena sejak awal Program Jalin Matra PFK ini mengabaikan kondisi lokal, yaitu adanya kemiskinan kultural di Kabupaten Probolinggo.

Mengenai penentuan penduduk miskin melalui pendataan Program Jalin Matra PFK, karena sebelumnya telah salah mendefinisikan kemiskinan dengan mengambil basis Desil 1 untuk pemberdayaan, berakibat kesalahan pendataan yang menghasilkan data yang dipastikan salah. Dari hasil analisis rekap data tahun 2017, ditemui berbagai kesalahan yaitu masih adanya penduduk usia tidak produktif, pencantuman usia produktif pada beberapa penduduk tidak produktif, adanya rumah tangga sasaran yang tidak terdata dalam Basis Data Terpadu (BDT), dan masih ada sasaran yang tidak teregistrasi menggunakan NIK. Kekeliruan yang memperlihatkan kesalahan data didapat cukup signifikan. Agar berjalan maksimal dan meminimalisir ketidaktepatan sasaran, maka kebijakan penanggulangan kemiskinan harus dicari penyebab, akar masalah serta jalan keluarnya. Penetapan sasaran harus sistematis dan *segmented*, dan tidak bersifat *one for all policy*.

Kata kunci : definisi kemiskinan, pendataan kemiskinan, Basis Data Terpadu, penanggulangan kemiskinan, Jalin Matra PFK

ABSTRACT

This research aims to identify and analyze deeply both defining and targeting through poverty data collection of Jalin Matra PFK alleviation program implemented in Probolinggo District, so the program effectiveness in achieving these goals is known. In order to gain complete description about defining poverty and poor targeting of Jalin Matra PFK alleviation program, qualitative with case study method was applied on this research using primary and secondary data sources. Data collection is done through observation, in-depth interviews, FGDs, also literature. Data is then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Furthermore, to test validity of the data using triangulation, which uses something other than the data for comparison or check the validity, maintain the data objectivity, also ensure valid data.

The results of this research showed that in defining poverty, bureaucrats argued that Decile 1 was not suitable for use in Jalin Matra PFK alleviation program. Religious leaders/community leaders/traditional leaders want poverty to be handled jointly among communities because it is a common problem, and not an individual destiny. Whereas the public assumes that all assistance provided by the government in any framework, should be equated because the public sees that aid is an equal distribution of development outcomes for anyone, and does not look at its designation. In dealing with cultural poverty in Probolinggo District, this program eventually encountered obstacles which resulted in the failure of targets, numbers and uses. This lack of success arises because from the very beginning the Jalin Matra PFK alleviation program ignored local conditions about the existence of cultural poverty in Probolinggo District.

Jalin Matra PFK alleviation program was failure in targeting because previously had been wrong to define poverty by taking Decile 1 bases for empowerment, then resulting in data collection errors which resulted in data that was confirmed to be wrong. From the analysis results of 2017 data recap, various errors were encountered, such as the existence of unproductive age population, the inclusion of productive age in some unproductive target, the presence of households that were not recorded in the Integrated Data Base (BDT), and there were still unregistered targets use NIK. The data errors obtained are quite significant. To run optimally and minimize the inaccuracy of targets, poverty alleviation policies must be sought for causes, root causes and solutions. Targeting must be systematic and segmented, and not one for all policy

Keyword: *poverty definition, poverty collection data, unified database (BDT), alleviation program, Jalin Matra PFK*